

# KEBIJAKAN LARANGAN BEPERGIAN (TRAVEL WARNING) AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PASCA BOM BALI 2002

Oleh: BUDI SUKARNO ( 05260123 )

International Relation

Dibuat: 2010-02-11 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Kata kunci: Kebijakan, Larangan Bepergian, Pasca Bom Bali

v

Malang

## ABSTRAKSI

Budi Sukarno, 2009, 05260123, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Social dan Politik, Hubungan International, Kebijakan Australia dalam mengeluarkan Travel Warning kepada Indonesia pasca Bom Bali I 2002 (2002-2008) , Pembimbing I: Yusli Effendi., S.IP.,MA, Pembimbing II: Yana Syafriana Hijrie.,S.IP

Travel Warning adalah peringatan atau larangan bepergian dari suatu negara ke negara lain dengan alasan negara tersebut dianggap tidak aman dan berbahaya bagi warganya yang hendak berkunjung. Seperti yang pernah dikeluarkan pemerintah Australia setelah peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II, Peledakan di depan Kedubes Australia, peledakan Hotel JW Marriot Kuningan Jakarta dan pelaksanaan eksekusi tiga terpidana mati Bom Bali yakni, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron. Dalam peristiwa peledakan Bom Bali I banyak menelan korban jiwa, terutama dari warga Negara Australia.

Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Australia mengeluarkan Travel Warning kepada warganya agar berhati-hati jika ingin bepergian ke Indonesia. Namun, pemberlakuan Travel Warning oleh Pemerintah Australia justru sarat akan muatan paksaan. Meski Negara Indonesia dinyatakan aman setelah terjadinya peristiwa Bom Bali II, Pemerintah Australia masih menganggap Indonesia sebagai Negara yang cukup berbahaya. Sehingga, hal itu memicu Pemerintah Australia untuk tetap memberlakukan Travel Warning. Sesungguhnya, Travel Warning memiliki tujuan terselubung, yakni supaya Indonesia tunduk dan mengikuti keinginan Pemerintah Australia. Cara paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia tersebut dinamakan coercive diplomacy.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Peneliti menggunakan konsep coercive diplomacy. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Travel Warning Australia dikeluarkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan warganya. Selain itu, Travel Warning inilah yang dijadikan sebagai alat coercive diplomacy Australia kepada Indonesia untuk mempengaruhi dan menundukan Indonesia dihadapan Pemerintah Australia. Karena, keberadaan Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi warga Australia dan Indonesia dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus terorisme yang ada.

## ABSTRAC

Budi Sukarno, 2009, 05260123, Muhammadiyah University of Malang, Faculty of social and politic, International Relationship, Australian's Policy in expel Travel Warning to Indonesia after explosion Bali Bomb I 2002 (2002-2008), Supervisor

I: Yusli Effendi, S.IP.,MA, Supervisor II: Yana Syafriana Hijrie, S.IP

Travel Warning is admonition or prohibition travel from one country to another country in consideration that the country is reputed as unsafe and dangerous for citizen who will visit. As do by Australia Government that put into effect Travel Warning after Bali Bomb explode I, II, bomb explosion in front of Australia Embassy, bomb explosion in JW Marriot hotel in Kuningan Jakarta and execution on three persons who punish to be dead, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron. In the Bali Bomb I explosion incident require many victims, most of them are Australian.

After the incident, Australian Government that put into effect Travel Warning for their citizen to be careful, if they wish to go to Indonesia. However, regulation of Travel Warning by Australian Government is full of compulsion. In spite of Indonesia stated as a secure country after explosion of Bali Bomb II, Australia Government still have a notion that Indonesia is a dangerous country. Its make Australian Government to do Travel Warning constantly. Actually, it has under cover destination to make Indonesia Government to submit and follow the higher authority of Australian Government. The way that used by Australian Government named coercive diplomacy.

Research method that used by researcher in this paper is descriptive. The researcher use coercive diplomacy concept. Whereas, the result of this research is Travel Warning that produce by Australia to Indonesian Government used to keep their citizen safely. On the other hand, this Travel Warning is function as asset of Australian coercive diplomacy to influences and submits Indonesian Government to a higher authority, Australia. Australian stated that Indonesia is a kind of threat and Indonesia demanded to finish the terrorism case as soon as possible.